

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini konstelasi politik di Indonesia sangat perlu dalam melibatkan segala unsur masyarakat demi kesuksesan pemilu itu sendiri. Konstelasi politik kini hadir di tengah-tengah zaman millennial sebagai pilihan, pilihan dalam menentukan sikap terhadap konstelasi politik di Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan setiap generasi pada zamannya mempunyai ciri dan karakteristik masing-masing. Beragam kesamaan atau pun perbedaan di dalamnya layak dapat dijadikan sebagai gambaran umum atas bagaimana mereka berperilaku. Salah satu generasi yang paling mencolok karena terkenal dengan keragaman yang berada di dalamnya adalah Generation Y atau yang biasa dikenal dengan generasi millennial (Solomon, 2009).

Menurut proyeksi Penduduk Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang di rilis oleh Tirto.id pada tanggal 12 September 2018, bahwa yang di sebut dengan kelompok generasi muda atau millennial adalah mereka yang berusia antara 20-34 tahun, sehingga di anggap bahwa kelompok dengan usia seperti itu seharusnya akan menyumbangkan 23,95 persen dari jumlah keseluruhan populasi di Indonesia yang di proyeksi oleh BPS sendiri yaitu mencapai 265 juta jiwa di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 ini di proyeksikan sebanyak 23,77 persen dari jumlah keseluruhan populasi di Indonesia yaitu 268 juta jiwa, yang berarti hampir seperlima penduduk di Indonesia adalah kelompok millennial.

Hal ini pun ketika demokrasi itu sendiri mendapatkan perhatian yang banyak dari generasi muda, maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi salah satu syarat yang penting untuk di pertimbangkan terkait dengan pembentukan kepemimpinan dari sebuah negara yang dimana pemilu sendiri memiliki fungsi utama untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Sehingga disinilah peran generasi muda di anggap penting karena dianggap memiliki potensi yang besar untuk mendongkrak kekuatan politik dikarenakan jumlahnya yang terbilang cukup banyak.

Akan tetapi meskipun memiliki jumlah yang banyak, dari segi politik masih banyak diantara mereka yang bersikap apatis, hal ini berdasarkan dengan penelitian terdahulu oleh Rojaby (2018) mengatakan bahwa generasi muda ini baru memahami politik masih sebagai sesuatu yang baku, seperti pemerintah ataupun cara untuk menjadi penguasa, namun generasi muda ini bukan berarti tidak mengetahui politik itu sendiri melainkan mereka lebih bersikap apatis terhadap politik. Hal ini pun terjadi disebabkan dari kekecewaan mereka sehingga membentuk pemikiran yang mengartikan bahwa politik hanyalah berisi konten-konten yang negatif saja dan juga peran media yang lebih banyak menyuguhkan sudut pandang negatif dari politik itu sendiri, sedangkan disisi lain pemberitaan politik dari sudut pandang positif pun kurang dan tidak di beritakan secara meluas, sehingga hal ini mendasari generasi muda bersikap apatis terhadap politik dikarenakan kurang adanya sosialisasi politik pada masyarakat khususnya pada generasi muda, memiliki sifat pragmatis informan dan citra negatif yang di bangun oleh media massa.

Dalam penelitian sebelumnya mengatakan bahwa generasi muda masih ada yang bersikap apatis terhadap politik, hal itu muncul seiring dengan pemberitaan media-media yang sering menyuguhkan sisi negatif dari politik itu sendiri. Namun berbeda halnya dengan apa yang akan di teliti saat ini bahwa generasi muda pada dasarnya memiliki keunikan dalam mengekspresikan politiknya seperti menjadi relawan dalam konstelasi politik 2019, sehingga menandakan bahwa generasi muda masih ada yang tidak memilih untuk bersikap apatis terhadap politik. Hal ini sejalan dengan argument dari McClosky dalam Budiarto (2008) yang mengemukakan tentang definisi partisipasi politik, yaitu:

“Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat yang dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.”

Disisi lain masih ada beberapa pendapat terkait dengan partisipasi politik yaitu menurut David Easton dalam Rauf (1991), mengemukakan bahwa, “partisipasi politik ialah kegiatan menyampaikan dukungan dan tuntutan”. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti dalam Cholisin dkk (2007), “partisipasi politik lebih dcondongkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi hidupnya”. Pengertian yang lebih rinci disampaikan oleh Herbert McClosky dalam Damsar (2010), yang mana “partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sukarela dalam ikut andil proses pembuatan kebijakan yang dihasilkan pemerintah.”

Berangkat dari beberapa penjelasan di atas maka sebenarnya keterlibatan masyarakat umum khususnya anak muda dalam partisipasi politiknya sangatlah

penting dikarenakan zamanyang terus berkembang dan menyesuaikan dengan generasinya. Di satu sisi hal yang paling di soroti di tahun 2019 ini adalah keterlibatan generasi muda dalam konstelasi politik dengan cara menjadi *volunteer* (relawan). Sebenarnya fenomena relawan bukanlah hal yang baru ada di Indonesia. Awal dari kemunculan relawan pada dasarnya merupakan bentuk dari gerakan-gerakan kemanusiaan yang di lakukan oleh sebagian masyarakat sebagai respon mereka terhadap permasalahan-permasalahan yang menyangkut kemanusiaan, seperti singgungan antara ras, suku serta agama yang terjadi pada kisaran tahun 1997 sampai dengan 1998 di Indonesia sendiri. Sedangkan disisi lain munculnya konsep relawan dalam dinamika politik di sebabkan dampak yang di timbulkan oleh keresahan terhadap konstelasi politik pada saat itu. Hal lain yang membuat konstelasi politik pada saat itu lebih memburuk adalah pemerintah yang di anggap kurang memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di akar rumput. Dengan demikian hal ini menjadi salah satu faktor aktivitas kerelawanan semakin meluas di berbagai kalangan untuk memperbaiki kondisi yang terjadi di jamannya.

Pasca reformasi aktivitas relawan semakin mengakar dimasyarakat, beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti tsunami di Aceh dan gempa di Jogja mendapat respon yang baik dan cepat dari para relawan. Hal tersebutlah yang membuat semakin mempesonanya konsep relawan di masyarakat sehingga pemaknaan relawan ini di anggap sebagai konsep yang bisa membantu dalam hal perpolitikan yang ada di Indonesia sendiri. Disisi lain berdasarkan paper oleh Jati (2016) yang disampaikan pada seri diskusi "*Epistema Institute*", mengemukakan bahwa dari segi

kajian komparasi, kemunculan volunterisme politik di negara berkembang atau negara demokrasi yang baru memiliki sedikit perbedaan dari segi pengalamannya, hal ini bisa di lihat dari: *Pertama*, bahwa negara yang masih berkembang belum memiliki sejarah sosial demokrasi yang kokoh seperti di barat, dan uniknya malah yang kokoh adalah paham terkait patrimonialisme. *Kedua*, konsep voluntarisme politik yang muncul di negara berkembang di negara demokrasi yang baru tidak mengarah pada suatu bentuk institusionalisasi politik, akan tetapi lebih mengarah pada respons emosional masyarakat umum terhadap konstelasi politik pada saat itu. *Ketiga*, tidak adanya kelanjutan dari gerakan volunterisme politik yang terbentuk dalam negara demokrasi, malahan hanya menjadi kelompok partisipan setelah itu masuk dalam ruang lingkup kekuasaan dan menjadi kelompok elite yang baru.

Menurut Tornquist dalam Jati (2016) mengemukakan bahwa perkembangan volunterisme dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia dapat dilihat dari kebangkitan representatif populer yang menyebar luas dalam kasus negara demokrasi dunia ketiga. Hal inilah yang mendasari dorongan adanya voluntarisme politik yang dimana bertujuan untuk mewujudkan partisipasi politik yang aktif di masyarakat khususnya generasi muda sehingga tidak hanya di jadikan objek politik pasif dalam setiap pemilu di selenggarakan.

Gerakan yang berkonsepkan relawan memiliki persamaan dan perbedaan yang pada umumnya wajar terjadi dalam sebuah gerakan dengan konteks relawan contohnya seperti di tahun pemilu 2014 dan 2019 yaitu seperti Relawan Demokrasi (RELASI)

yang bertugas dalam memberikan sosialisasi terkait pemilu kepada masyarakat dan cara menggunakan hak pilih mereka. Secara fungsinya RELASI ini membantu KPU di setiap kabupaten dan kota di Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut. Disisi lain ada juga relawan yang di anggap basis terbesar pada saat itu, yaitu Pro Jokowi (PROJO) yang dimana relawan-relawan pendukung jokowi ini adalah relawan-relawan yang mengambil peran penting dalam kemenangan Jokowi di pilpres 2014. Tujuan berdirinya PROJO ini adalah untuk memenangkan Jokowi, akan tetapi sekarang PROJO sudah bertransformasi menjadi organisasi masyarakat (ORMAS) dan tetap setia mengawal pemerintahan jokowi sampai dengan saat ini. Lama sudah tidak terdengar akhirnya muncul kembali ketika pemilu serentak yang sebentar lagi akan di laksanakan., PROJO masih sama dengan sebelumnya, meskipun sudah bertransformasi menjadi ORMAS akan tetapi tujuannya masih sama yaitu mendukung jokowi dalam konstelasi politik tahun 2019 ini. Ada juga gerakan yang berbasis relawan seperti Teman Ahok. Berdasarkan penelitian oleh Astutik (2017), mengatakan bahwa Teman Ahok sendiri merupakan perkumpulan relawan-relawan yang didirikan oleh beberapa anak muda yang masih ingin Ahok menjadi pemimpin di DKI kala itu. Ahok yang ingin maju sebagai calon independen pada saat itupun harus memenuhi syarat seperti mengumpulkan KTP dari warga DKI, sehingga hal inipun menjadi salah satu fokus Teman Ahok untuk mendukung Ahok meneruskan kepemimpinannya di DKI. Teman Ahok pun melakukan marketing politik yang kreatif sehingga bisa menaikkan citra Ahok di kalangan masyarakat dan bisa mendapatkan dukungan dari warga DKI. Akan tetapi dalam kenyataannya Ahok mencalonkan diri

kembali lewat jalur partai hal inipun tidak sesuai dengan keinginan dari teman Ahok akan tetapi uniknya mereka tetap mendukung Ahok meskipun Ahok lebih memilih untuk maju lewat jalur partai.

Sedangkan dengan Relawan generasi muda seperti Gerakan Millennial Indonesia (GMI) mereka adalah sebuah wadah yang berbasiskan relawan anak muda, yang pada fokusnya selain memberikan pendidikan atau kesadaran politik pada pemilih muda khususnya dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih muda terhadap pemilu 2019 juga memiliki satu tujuan yaitu mensosialisasikan calon yang di dukung oleh relawan generasi muda tersebut dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program-program yang di tawarkan oleh calonnya. Maka bisa dilihat bahwa persamaannya RELASI dan GMI adalah dimana sama-sama ingin memberikan pemahaman tentang pemilu dan cara dalam memberikan hak suaranya akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah dimana basis dari sebuah wadah tersebut dan tujuan dari wadah itu dalam konstelasi politik yang di ikutinya. Disisi lain persamaan GMI dengan relawan PROJO adalah sama-sama mendukung calon yang di dukungnya serta mensosialisasikan program-programnya hanya saja GMI lebih berbasiskan pada generasi muda, generasi yang memiliki keunikan tersendiri dalam artian memiliki strategi sendiri dalam membrending calon yang di dukungnya. Sedangkan PROJO disini memiliki basis massa dari semua kalangan tidak hanya pada generasi muda saja yang terlibat dan hal itupun berdampak pada PROJO yang masih bertahan sampai sekarang tidak hanya pada

Kontestasi politik 2014 saja, lebih dari pada itu sampai bertransformasi menjadi ORMAS.

Terakhir persamaan dengan relawan Teman Ahok adalah mereka sama-sama memiliki juga basis anak muda yang dimana gerakan-gerakan ini sama-sama di dirikan oleh anak muda dan bertujuan untuk mensosialisasikan calon dan program-program yang di tawarkannya. Akan tetapi yang menjadi pembeda ialah Teman Ahok ini muncul dikarenakan pada saat itu Ahok ingin maju lewat jalur independent oleh karena itu muncullah relawan-relawan yang mengatasnamakan Teman Ahok ini, yang bertugas membrending citra calon, membuka komunikasi politik dan marketing politik yang kreatif serta mengumpulkan KTP sebagai syarat untuk calon yang melewati jalur independent sedangkan berdasarkan wawancara dengan Aris Munandar selaku juru bicara GMI DIY mengatakan bahwa GMI sendiri muncul berdasarkan inisiatif dari anak muda yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang terstruktur, terorganisir dalam menyambut bonus demografi dan tujuan tersebut sama dengan visi misi serta program yang di tawarkan oleh pasangan 02 sehingga hal inilah yang membuat GMI berafiliasi dengan mendukung pasangan calon nomor urut 02 tersebut.

Disisi lain Menurut laporan penelitian dari Fahrimal dan Muffaruddin (2018), mengatakan bahwa paradigma relawan politik tidak sama dengan tim sukses. Tim sukses digunakan sebagai bagian suksesi untuk memenangkan calon dalam setiap pemilihan. Sebaliknya, tanggung jawab dari relawan politik lebih besar dari itu. Relawan politik lahir dan berkembang didasarkan oleh dorongan hati nurani setiap orang. Dorongan hati nurani ini dipengaruhi oleh kesadaran setelah individu

melakukan evaluasi terhadap *track record* dan program-program yang ditawarkan oleh calon. Artinya, relawan politik bukan hanya memenangkan calon, namun lebih kepada menyukseskan program yang ditawarkan oleh calon. Kontribusi relawan politik tidak hanya sebatas memberikan hak suaranya pada saat pemilihan. Tugas paling besar dari relawan politik adalah bagaimana menggerakkan dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya politik di masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat sadar akan haknya sebagai warga negara untuk menyumbangkan suaranya dalam setiap pemilihan baik Kepala Daerah, Legislatif, maupun Presiden.

Setelah penjelasan di atas yang cukup panjang terkait dengan relawan politik dan partisipasi politik, menjadikan penelitian ini menarik untuk di lihat dari sisi keterlibatan masyarakat atau warga negaranya khususnya anak muda dalam konstelasi politik di Indonesia karena hal ini tidak terlepas dari pembahasan kerelawanan dan partisipasinya itu sendiri. Hal yang dimaksudkan dengan keterlibatan masyarakat atau biasa di sebut dengan *Civic Engagement* adalah sebagai berikut:

Ehrlich (2000) mendefinisikan *Civic Engagement* adalah:

“Civic Engagement means working to make a difference in the civic life of our communities and developing the combination of knowledge, skills, values and motivation to make that difference. It means promoting the quality of life in a community, through both political and nonpolitical processes”.

Dalam artiannya *Civic Engagement* berarti bekerja untuk membuat perbedaan pada kehidupan masyarakat sipil dan mengembangkannya dengan kombinasi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan motivasi untuk membuat perbedaan itu.

Segala aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan di masyarakat, baik melalui proses politik ataupun proses non-politik.

Disisi lain berdasarkan pernyataan dari Ramaley dalam Addler & Goggins (2005), yang mengatakan bahwa narasi dari definisi *Civic Engagement* tergantung pada sudut pandang dan kepentingan pembuat definisi tersebut. Maka *Civic Engagement* ini dimaksudkan untuk melihat dari sudut pandang kondisi masyarakat berdasarkan individual maupun kolektif ikut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat didasarkan kepada keterampilan, keahlian, pengetahuan, yang di gabungkan dengan nilai-nilai, dan motivasi serta komitmen dalam melakukan perubahan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan lebih baik lagi, melalui proses politik ataupun proses non politik. Sehingga hal ini yang membuat *Civic Engagement* selalu di anggap selaras dengan kegiatan yang bersifat kerelawanan, hal inipun di dasarkan oleh prinsip kesukarelaan yang sudah di jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu disetiap kegiatan yang dilakukan oleh relawan harus didasari oleh keinginannya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dalam artian relawan harus berdasarkan inisiatifnya sendiri dalam mengikuti setiap kegiatan dari wadah/gerakan yang di ikutinya.

Fenomena ini menjadi menarik jika melihat salah satu wujud pelibatan anak muda dalam konstelasi politik adalah menjadi relawan dalam gerakan sebagai wadah mereka menentukan sikap politiknya dalam artian gerakan sebagai wadah merupakan sarana bagi anak muda untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara

atau daerah dalam pemilu serentak tahun 2019 ini. Hal ini sejalan dengan gerakan yang berbasiskan anak muda seperti Gerakan Millennial Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta. GMI merupakan wadah baru terhadap generasi muda dalam menyampaikan sikap politiknya terkait dengan konstelasi politik yang ada di Indonesia sekarang ini.

Berdasarkan wawancara dengan Aris Munandar selaku Juru Bicara 2 GMI DIY (pada tanggal 13 Maret 2019) mengatakan bahwa GMI terbentuk awalnya inisiatif dari anak-anak muda dengan tujuan mempersiapkan dan mengorganisir generasi muda dalam menyambut bonus demografi. Dengan tujuan tersebut GMI sendiri mengkaji terlebih dahulu manakah visi misi dan program yang di tawarkan oleh calon presiden di pemilu 2019 yang sejalan dengan tujuan didirikannya GMI ini. Sehingga sekarang bisa di lihat bahwasannya GMI lebih berafiliasi dengan mendukung pasangan calon nomor urut 02 karena dianggap bahwa visi misi dan programnya sudah sejalan dengan tujuan dari GMI ini berdiri. Akan tetapi Aris Munandar juga menambahkan bahwa GMI akan terus berkontribusi dan menjadi sebuah gerakan yang aktif mengkritik ataupun mendukung pemerintah demi keseimbangan dalam membangun negara ini. Disisi lain berdasarkan wawancara dengan Aris Munandar bahwa GMI Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang ini terbentuk pada tanggal 8 Desember 2018 dan sudah memiliki 250 relawan sampai dengan saat ini, hal itu berdasarkan jumlah yang tergabung dalam grup WhatsApp. Sehingga hal ini bisa dilihat bahwa GMI DIY hanya membutuhkan waktu hampir 4 bulan terhitung dari bulan Desember-Maret dalam mengumpulkan

relawan anak muda yang ada di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta dengan jumlah yang terbilang cukup banyak ini. Namun hal ini pun di katakan Aris Munandar masih terbilang jauh dari targetnya yang harus mencapai 350 relawan. Padahal jika dilihat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri dengan merujuk pada data proyeksi BPS yang di rilis oleh tirto.id (12 September 2018) terkait dengan persebaran generasi millennial di Indonesia memiliki jumlah 911 jiwa. Hal inipun sangat memungkinkan untuk relawan GMI DIY bertambah seiring berjalannya waktu.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini di lakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk keterlibatan relawan GMI DIY dalam konstelasi politik 2019 dengan melihat unsur-unsur yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat itu sendiri seperti kerelawanan dan partisipasi politik khususnya generasi muda. Selanjutnya hal ini menjadikan penelitian ini menjadi menarik dikarenakan selama ini penelitian tentang partisipasi politik masyarakat hanya berfokus pada politik uang, dan pendidikan politik. Jarang ditemukan penelitian yang komprehensif mengkaji Bagaimana bentuk keterlibatan relawan GMI DIY dan apa faktor yang mendorong generasi muda terlibat menjadi relawan GMI DIY dalam konstelasi politik 2019. Mengingat keterlibatan masyarakat khususnya anak muda dengan semangat kesukarelaannya berpartisipasi dalam konstelasi politik merupakan faktor penting untuk dikaji guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *Civic Engagement*: voluntarisme generasi muda dalam konstelasi politik 2019 dengan studi kasusnya adalah GMI DIY.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang sudah di jelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan relawan GMI DIY dalam konstelasi politik 2019?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong generasi muda terlibat menjadi relawan GMI DIY dalam konstelasi politik 2019 ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan relawan GMI DIY dalam konstelasi politik 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong generasi muda terlibat menjadi relawan GMI DIY dalam konstelasi politik 2019.

3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini penting untuk di lakukan, karena dari penelitian ini bisa mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang di angkat. Manfaat yang di dapatkan dari penelitian ini berupa:

3.2.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini akan memberikan penjelasan dan pemahaman secara ilmu sosial dan politik terkait dengan bentuk keterlibatan relawan GMI DIY dalam konstelasi politik 2019.
2. Dalam konteks akademik, penelitian ini akan memberikan kontribusi terkait faktor yang mendorong generasi muda terlibat menjadi relawan GMI DIY dalam konstelasi politik di tahun 2019.

3.2.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa dalam memahami realitas keterlibatan generasi muda dalam konstelasi politik 2019.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan rekomendasi bagi peneliti yang akan meneliti terkait bentuk keterlibatan generasi muda dalam konstelasi politik di tahun-tahun berikutnya.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk mengetahui penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan agar penelitian yang dilakukan peneliti ini bisa diterima secara original serta terhindar dari persepsi plagiat. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Rojaby (2018) dalam penelitian yang berjudul *Apatisme Generasi Millennial Terhadap Politik (Studi Kasus Kodok Alas Pada Pilgub Jatim 2018)* yang menjelaskan

bahwa pemahaman generasi millennial pada politik masih berorientasi pada sesuatu yang baku secara menyeluruh dan terperinci. Dampak ini bisa di lihat langsung dari sikap apatisisme generasi muda terhadap politik. Sehingga dalam penelitiannya memberikan hasil dari penyebab yang menjadikan generasi muda ini lebih bersifat apatis terhadap politik, antara lain, kurangnya sosialisasi politik pada kalangan generasi muda, cenderung bersikap pragmatis sebagai informan, dan framing negatif yang di bangun oleh media massa.

Arianto (2016) dalam penelitian yang dituangkan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) Vol. 20, No. 1 edisi Juli 2016, yang berjudul Menakar Peran Relawan Politik Pasca Kontestasi Presidensial 2014, menjelaskan bahwa relawan politik pada dasarnya lebih banyak bergerak pada ranah-ranah media sosial yang kemudian di bagi tipologi menjadi relawan komunitas dan relawan non komunitas. Sehingga bisa dilihat bahwa dari kedua tipologi relawan ternyata masih lebih banyak memilih sikap pasif dari pada aktif. Dengan kata lain sikap pasif lebih di tunjukkan untuk menjadi pengawas pemerintah, sedangkan sikap aktif lebih berperan sebagai pengawal kekuasaan. Dengan demikian peran relawan dalam politik digital pasca kontestasi presidensial 2014 lebih memperkuat pelembagaan aktivisme digital sebagai wahana pendidikan politik publik.

Yuhdi dan Muffaruddin (2015) dalam laporan hasil penelitian KPU Kabupaten Aceh Barat yang berjudul *Political Voluntarism Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat*, menjelaskan bahwa *political voluntarism*

tidak muncul dan berkembang pada masyarakat Aceh Barat, hal ini di karenakan masyarakatnya yang di gerakakan oleh uang (48,9%) untuk ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik dan masyarakat tidak ingin terlibat dan tidak menyediakan waktu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik (54,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa *Political voluntarism* hanya memberikan kontribusi sebesar 27 persen (R Square 0.272) terhadap partisipasi politik masyarakat dan partisipasi politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat literasi politik, pendidikan politik, sosialisasi politik, dan informasi politik.

Juditha dan Darmawan (2018) dalam penelitian yang dituangkan dalam Jurnal Komunikasi dan Opini Publik Vol. 22 No. 2 edisi Desember 2018, yang berjudul Penggunaan Media Digital Dan Partisipasi Politik Generasi Millennial, menjelaskan bahwa media sosial dan grup obrolan online adalah media digital yang paling dominan digunakan. Sementara untuk konten digital yang paling sering diakses adalah film, pesan teks dan video digital. Generasi milenial menganggap bahwa topik politik sebagai topik yang biasa saja tetapi tetap mengikuti berita-berita politik yang diakses dari media online dan televisi. Partisipasi politik responden juga cenderung rendah. Meski demikian mayoritas mereka tetap akan memberikan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Indonesia tahun 2019.

Jati (2016) dalam penelitian yang berjudul Voluntarisme Politik Di Kalangan Kelas Menengah Urban, menjelaskan bahwa tumbuh kembangnya sikap sukarelawan politik sendiri masih bersifat mengarah pada kekuasaan sehingga sifatnya lebih

partisan. Hal tersebut sebenarnya bukanlah hal negatif mengingat hampir mayoritas model voluntarisme politik yang berkembang juga berciri khas sama.

Morissan (2014) dalam penelitian yang dituangkan dalam Jurnal Visi Komunikasi Vol. 13, No. 01, edisi Mei 2014, yang berjudul Media Sosial Dan Partisipasi Sosial Di Kalangan Generasi Muda, menjelaskan bahwa penggunaan media sosial dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori yang dalam hal ini menunjukkan peran masing-masing dari pengguna ketika mengkonsumsi media sosial, yakni: penonton (*watchers*), pembagi informasi (*sharers*), komentator (*commenters*), dan produsen (*producers*). Hal ini di perjelas dengan adanya penelitian di sejumlah negara yang di bahas juga dalam penelitian ini, hal itupun menghasilkan kesimpulan bahwa generasi muda mampu mengemukakan preferensi dan minat mereka terhadap politik. Sebagian dari mereka bahkan lebih aktif dari kebanyakan generasi yang lebih tua. Mereka juga menginginkan agar pandangan mereka lebih bisa didengar.

Arianto (2014) dalam penelitian yang dituangkan dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 18, No. 2, edisi November 2014, yang berjudul Fenomena Relawan Politik Dalam Kontestasi Presidensial 2014, menjelaskan bahwa munculnya gerakan sosial telah melahirkan tradisi voluntarisme di dalam politik. Hal ini juga turut menggabungkan nilai-nilai politis yang bernuansa patrimonial dan oligarkis menjadi voluntarisme dan partisipatoris. Hal inilah yang membuat banyak dari relawan yang bergerak secara offline dan online sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap politik.

Lestari dalam penelitian yang di tuangkan dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Efek Vol 1, No 1, Desember 2017, yang berjudul *Civic Engagement* Menggunakan Media Online di Kalangan Anak Muda Kota Padang, menjelaskan bahwa di satu sisi internet memang menjauhkan anak muda dengan isu-isu politik, namun isu-isu sosial, pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian utama anak-anak muda di Kota Padang. Merasa suara tidak didengar dan tidak penting menjadi alasan keengganan untuk terlibat di isu-isu politik.

Dengan demikian penelitian terdahulu banyak yang mengkaji dan menganalisis *Civic Engagement* dari sudut pandang media online dan voluntarisme dari sudut pandang fenomena kemunculan, peran, dan pengaruh hanya saja secara komprehensif menganalisis bentuk keterlibatan relawan GMI DIY dan faktor apa yang mendorong generasi muda terlibat menjadi relawan GMI DIY dalam konstelasi politik cukup jarang di bahas. Hal ini yang membuat penelitian saat ini merupakan penelitian yang berfokuskan hanya pada ruang lingkup keterlibatan relawan GMI DIY, hal ini di karenakan bahwa generasi muda memiliki karakteristik yang unik dalam artian mereka memiliki caranya sendiri dalam berpartisipasi dalam politik khususnya di GMI DIY. Disisi lain dalam penelitian ini bukan hanya mengkaji bentuk keterlibatan dari relawan generasi muda akan tetapi juga mengkaji terkait faktor apa yang mendorong generasi muda terlibat menjadi relawan GMI DIY dalam konstelasi politik tahun 2019.

5. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori memberikan suatu pijakan atau landasan teoritis dalam menganalisis data terkait *Civic Engagement*: voluntarisme generasi muda dalam konstelasi politik 2019. Untuk mencari tahu bentuk keterlibatan relawan GMI DIY dan faktor apa yang mendorong generasi muda terlibat menjadi relawan GMI DIY dalam konstelasi politik 2019, peneliti menggunakan beberapa teori yang relevan dengan objek penelitian, diantaranya yaitu teori *Civic Engagement*, partisipasi politik, voluntarisme dan generasi millennial. Teori ini di jabarkan sebagai berikut:

5.1. *Civic Engagement*

Ehrlich (2000) mendefinisikan *Civic Engagement* adalah:

“Civic Engagement means working to make a difference in the civic life of our communities and developing the combination of knowledge, skills, values and motivation to make that difference. It means promoting the quality of life in a community, through both political and nonpolitical processes”.

Dalam artiannya *Civic Engagement* berarti bekerja untuk membuat perbedaan pada kehidupan masyarakat sipil dan mengembangkannya dengan kombinasi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan motivasi untuk membuat perbedaan itu. Segala aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan di masyarakat, baik melalui proses politik ataupun proses non-politik.

Melalui penjabaran *Civic Engagement*, Jacoby (2009) memperluas lagi cakupan *Civic Engagement*, yaitu *“Civic Engagement is a complex and polyonymous concept and Civic Engagement is defined as acting upon a*

heightened sense of responsibility to one's communities.” Dari penjabaran Jacoby jelas merujuk bahwa *Civic Engagement* bukan hanya sekedar sikap semata yang dilakukan oleh warga negara guna menjadikan masyarakat disekitarnya menjadi lebih baik, melainkan juga sebagai *sense of responsibility* atau rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat sebagai seorang individu yang tidak egois dalam mementingkan diri sendiri guna memberikan manfaat untuk kepentingan bersama. Sehingga Jacoby (2009) mengatakan bahwa tidak ada definisi tunggal mengenai *Civic Engagement*, melainkan hanya tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya.

Jacoby (2009) menjabarkan gagasan dari *Coalition for Civic Engagement and Leadership* bahwa diperlukan beberapa hal dibawah ini untuk bisa disebut sebagai *Civic Engagement*, antara lain;

1. Belajar dari yang lain, diri sendiri, dan lingkungan untuk mengembangkan perspektif informasi tentang isu-isu sosial
2. Menghargai keragaman dan membangun jembatan diperbedaan
3. Berperilaku dan bekerja melalui kontroversi, dengan kesantunan
4. Mengambil peran aktif dalam proses politik
5. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik, berupaya dalam memecahkan masalah publik dan pelayanan masyarakat
6. Bertindak dalam kepemimpinan dan keanggotaan pada organisasi
7. Mengembangkan empati, etika, nilai dan rasa atas tanggung jawab sosial

8. Mempromosikan keadilan sosial secara lokal dan global.

Namun disisi lain menurut Pancer (2015) bahwa ukuran yang paling komperhensif dalam menjelaskan *Civic Engagement* adalah mengacu pada instrument survey dari *Center For Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE)*, yang dimana survei yang dilakukan oleh *CIRCLE* tersebut memiliki 19 indikator yang dibagi dalam tiga indikator besar, yaitu *Civic Indicator*, *Electoral Indicator*, dan *Indicator Of Political Voice*, dengan penjabarannya sebagai berikut:

1. *Civic Indicator* meliputi:

- 1) Pemecahan masalah masyarakat, dalam artiannya bekerja bersama secara informal dengan seseorang atau sekelompok orang untuk memecahkan masalah
- 2) Relawan reguler untuk organisasi non-pemilu, dalam artiannya bekerja dalam beberapa cara untuk membantu orang lain tanpa bayaran
- 3) Keanggotaan aktif dalam grup atau asosiasi, dalam artiannya ada rasa memiliki dan berpartisipasi aktif dalam kelompok atau asosiasi, baik lokal maupun nasional
- 4) Partisipasi dalam menjalankan penggalangan dana dengan, berjalan / berlari / bersepeda secara pribadi untuk kegiatan amal
- 5) Penggalangan dana lainnya untuk amal, seperti membantu mengumpulkan uang untuk tujuan amal

2. *Electoral Indicator* meliputi:

- 1) Voting pada umumnya, yang dimana voting yang dilakukan secara teratur dalam pemilihan lokal dan nasional
- 2) Membujuk yang lainnya, yang dimana berbicara dengan orang lain ketika pemilihan dan mencoba menunjukkan kepada mereka mengapa mereka harus memilih atau menentang salah satu partai atau kandidat
- 3) Menampilkan stiker, gambar, atau simbol, untuk seorang kandidat, partai politik, atau organisasi politik.
- 4) Berkontribusi terhadap kampanye, yang dimana menyumbangkan uang kepada kandidat, politisi partai, atau kegiatan apa pun yang mendukung kandidat.
- 5) Relawan untuk kandidat atau organisasi politik.

3. *Indicator of political voice* meliputi:

- 1) Menghubungi pejabat, yang dimana melakukan kegiatan seperti menghubungi atau mengunjungi pejabat publik, pada tingkat apa pun pemerintah, untuk meminta bantuan atau untuk mengekspresikan pendapat.
- 2) Menghubungi media cetak, yang dimana menghubungi Koran atau majalah untuk menyampaikan pendapat pada suatu masalah.
- 3) Menghubungi siaran media, yang dimana melakukan panggilan ke radio atau acara bincang-bincang televisi untuk mengekspresikan pendapat tentang masalah politik, bahkan jika itu tidak ditayangkan.
- 4) Protes, yang dimana ikut serta dalam protes pawai atau demonstrasi.

- 5) Petisi melalui email, seperti menandatangani petisi email.
- 6) Petisi tertulis, seperti menandatangani petisi tertulis terkait masalah politik atau social.
- 7) Memboikot, yang dimana tidak membeli sesuatu karena kondisi di bawah produk yang dibuat, atau karena ketidaksetujuan terhadap perusahaan yang memproduksinya.
- 8) Boycotting, yang dalam artiannya membeli produk atau layanan tertentu karena persetujuan nilai-nilai sosial atau politik dari perusahaan yang menghasilkan atau menyediakannya.
- 9) Mengumpulkan yang dalam artiannya melakukan beberapa pekerjaan sebagai seorang canvasser (seorang yang meminta suara) dari pintu ke pintu untuk kelompok atau kandidat politik atau sosial.

5.2. Partisipasi Politik

Menurut Budiardjo (2008), sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih peminan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen,

menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* nya dan sebagainya.

Disisi lain menurut Herbert McClosky, yang dikutip Budiardjo (2008), bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan umum, sedangkan Huntington dan Nelson dalam Budiardjo (2008), mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan politik oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Milbrath dan Goel dalam Rahman (2007) mengatakan bahwa partisipasi politik dibagi menjadi tiga jenis kegiatan, yakni;

1. Partisipasi aktif, yaitu keikutsertaan yang berpusat pada proses input sekaligus output.
2. Partisipasi pasif, ialah partisipasi yang hanya berfokus pada output saja. Output disini bermaksud hanya menerima, menaati dan menjalankan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tentu tanpa ada ikut campur dalam proses pembuatan.

3. Golongan putih, atau yang biasa disebut golput, atau kelompok apatis. Tidak mau terlibat dan menganggap bahwa sistem politik yang di jalankan tidak sesuai dengan yang di inginkan

Menurut Milbrath, dalam Maran (2001) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, adalah :

1. Adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau melalui diskusi informal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang, orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap problem sosial, politik ekonomi dan lain-lainnya biasanya mau terlibat dalam aktifitas politik.
3. Faktor karakteristik sosial seseorang, karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik dan untuk itulah mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik, lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Menurut Huntington dan Nelson (1994) partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi, yang di jabarkan sebagai berikut:

1. Partisipasi politik yang bersifat Otonom (*Autonomous Participation*) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan.
2. Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (*Mobilized Participation*) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain.

5.3. Voluntarisme Politik

Istilah relawan selama ini muncul dan populer hanya dalam aksi-aksi sosial yang dengan sukarela menyumbangkan dirinya untuk bekerja dengan tenaga dan pikiran tanpa berharap keuntungan materi apapun (Arianto, 2014). Hal ini sejalan dengan pengertian menurut Robotham dalam Benson (1980) mengatakan bahwa voluntarisme merupakan tindakan yang pada dasarnya memiliki sifat sosial dan kemasyarakatan, yang dimana pelaku atau aktornya tidak memperoleh upah, imbalan ataupun keuntungan materil. Jadi secara umum volunterisme sebetulnya bertolak pada prinsip kesukarelaan dalam menolong tanpa harus meminta imbalan materi. Tindakan ini lebih kepada upaya memberi bantuan. Hal ini di pertegas dengan defenisi yang di kemukakan oleh Korten (2002) bahwa, relawan ialah warga negara yang bekerja secara sukarela mengaktualisasikan dirinya dalam pekerjaan sebagai manusia yang bertanggungjawab yang didorong oleh nilai-nilai dan bertindak menurut cara-cara yang melebihi apa yang telah dirumuskan.

Mengutip dari Cnaan, Handy and Wadsworth (1996) menunjukkan bahwa *“Most Definition of volunteerism have four main components: free will behavior, with no monetary reward, aimed to help strangers/beneficiaries, on along-term basis or in a formal setting”*, dengan demikian dijelaskan bahwa volunterisme memiliki beberapa indikator utama. Berdasarkan definisinya, indikator tersebut yakni perilaku berkehendak bebas, tanpa imbalan, bertujuan membantu orang lain, dan atas dasar jangka panjang pengaturan informal. Disisi lain menurut (Penner, 2004) yang mengatakan bahwa *“Several studies examined personality traits and their impact on volunteering and found that empathic ability, self-efficacy, inner locus control, strong morality and self image influence the tendency to volunteer”*. Dalam penjelasannya, beberapa penelitian meneliti ciri-ciri kepribadian dan dampaknya pada kesukarelaan dan menemukan bahwa kemampuan empatik, *self-efficacy* (kepercayaan individu), kontrol lokus batin, moralitas yang kuat dan citra diri memengaruhi kecenderungan untuk menjadi sukarelawan.

Wilson dan Musick dalam Forbes dkk (2014) mengembangkan teori terpadu mengenai kerelawanan yang bersandarkan pada premis bahwa kerja sukarela adalah: (a) aktivitas produktif; (b) melibatkan tindakan bersama; dan (c) dipandu secara etik.

Namun voluntarisme yang tadinya bergerak dalam ranah-ranah sosial dalam dewasa ini telah berkembang dan masuk ke dalam ranah politik hal ini jelas menjadi tamparan keras buat partai politik. Hal ini kemudian di pertegas kembali

oleh Arianto (2014) yang mengatakan bahwa relawan politik dalam konteks ini tidak dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang dimobilisasi, sebab partisipasi yang lahir adalah partisipatif sukarela (otonomi) baik melalui aksi jalanan (offline) dan online.

5.4. Generasi Muda

Menurut Poerwadarminta (1976) kata “Muda” adalah belum sampai setengah umur, atau masih muda. Berikut Putra (2016) mengklarifikasikan dengan melihat tahun kelahiran generasi Y atau millennial sesuai pendapat para ahli, di antaranya:

Tabel 1.1
Pengelompokan Generasi

Sumber	Label				
Tapscott (1998)	-	Baby Boom Generation (1946-1964)	Generation X (1965-1975)	Digital Generation (1976-2000)	-
Howe & Strauss (2000)	Silent Generation (1925-1943)	Boom Generation (1943-1960)	13 th Generation (1961-1981)	Millennial Generation (1982-2000)	-
Zemke et al (2000)	Veterans (1922-1943)	Baby Boomers (1943-1960)	Gen-Xers (1960-1980)	Nexters (1980-1999)	-
Lancaster & Stillman (2002)	Traditionalist (1900-1945)	Baby Boomers (1946-1964)	Generation Xers (1965-1980)	Generation Y (1981-1999)	-
Martin & Tulgan (2002)	Silent Generation (1925-1942)	Baby Boomers (1946-1964)	Generation X (1965-1977)	Millenials (1978-2000)	-
Oblinger & Oblinger (2005)	Matures (<1946)	Baby Boomers (1947-1964)	Generation Xers (1965-1980)	Gen-Y/NetGen (1981-1995)	Post Millenials (1995-present)

Sumber: Jurnal Ilmiah Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi oleh Yanuar Surya Putra dalam *Among Makarti* Vol.9 No.18, Desember 2016

Dari tabel di atas merupakan pendapat-pendapat dari para ahli yang di kelompokkan untuk membagi generasi yang di antaranya dari Zemke et al, Lancaster dan Stillman, Martin dan Tulgan, serta Oblinger dan Oblinger.

Menurut Kurniadi (1991) bahwa generasi muda secara umum dapat dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan kepribadian manusia, sebagaimana juga dalam fase-fase lainnya, maka fase generasi muda ini mempunyai cirinya sendiri, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ciri yang menonjol dari fase generasi muda ini ialah peranannya dalam masa peralihan menuju suatu kedudukan yang bertanggung jawab dalam tatanan masyarakat, antara lain:

1. Kemurnian idealismenya.
2. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan baru.
3. Semangat dan pengabdianya.
4. Spontanitas dan dinamikanya.
5. Inovasi dan kreatifitasnya.
6. Keinginan-keinginannya untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru.
7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri.
8. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada.

6. Definisi Konseptual

6.1. *Civic Engagement*

Civic Engagement sebagai upaya individu dengan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah melalui proses dan jalan politik dengan melibatkan partisipasi yang berdasarkan dari kesadaran individu diri sendiri untuk perubahan tatanan sosial yang lebih baik lagi melauai proses politik atau proses non politik.

6.2. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga bisa individual atau kolektif dan terorganisir atau spontan untuk menentukan pilihan yang dalam artiannya dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerahan atau murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi.

6.3. Voluntarisme Politik

Voluntarisme politik adalah respon terhadap problematika sosial yang bergerak secara sukarela dengan kesadaran diri dan bertanggungjawab serta tanpa meminta imbalan dan bertujuan membantu orang lain demi kesejahteraan masyarakat secara luas.

6.4. Generasi Muda

Generasi muda merupakan generasi yang memiliki keunikan, kreatif dan mempunyai cirinya sendiri, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini di tandai dengan peranannya dalam masa peralihan menuju suatu kedudukan yang bertanggung jawab dalam tatanan masyarakat.

7. Definisi Oprasional

7.1. Civic Engagement

Pancer (2015) mengacu pada instrument survey dari *Center For Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE)*, yang dimana survei yang dilakukan oleh *CIRCLE* tersebut memiliki 19 indikator yang dibagi dalam tiga indikator besar, yaitu *Civic Indicator*, *Electoral Indicator*, dan *Indicator Of Political Voice*, dengan penjabarannya sebagai berikut:

1. *Civic Indicator* meliputi:
 - 1) Pemecahan masalah masyarakat.
 - 2) Relawan reguler untuk organisasi non-pemilu.
 - 3) Keanggotaan aktif dalam grup atau asosiasi.
 - 4) Partisipasi dalam menjalankan penggalangan dana dengan, berjalan / berlari / bersepeda secara pribadi untuk kegiatan amal.
 - 5) Penggalangan dana lainnya untuk amal.

2. *Electoral Indicator* meliputi:

- 1) Voting pada umumnya.
- 2) Membujuk yang lainnya.
- 3) Menampilkan stiker, gambar, atau simbol.
- 4) Berkontribusi terhadap kampanye.
- 5) Relawan untuk kandidat atau organisasi politik.

3. *Indicators of political voice* meliputi:

- 1) Menghubungi pejabat.
- 2) Menghubungi media cetak.
- 3) Menghubungi siaran media.
- 4) Protes.
- 5) Petisi melalui email.
- 6) Petisi tertulis.
- 7) Memboikot.
- 8) *Boycotting*.
- 9) Mengumpulkan.

7.2. Partisipasi Politik

Menurut Milbrath, dalam Maran (2001) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, adalah :

1. Adanya Perangsang
2. Faktor Karakteristik Pribadi Seseorang
3. Faktor Karakteristik Sosial Seseorang
4. Faktor Situasi Atau Lingkungan Politik

7.3. Voluntarisme Politik

Wilson dan Musick dalam Forbes dkk (2014) mengembangkan teori terpadu mengenai kerelawanan yang bersandarkan pada premis bahwa kerja sukarela adalah: (a) aktivitas produktif; (b) melibatkan tindakan bersama; dan (c) dipandu secara etik.

8. Metode Penelitian

8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif. Deskriptif kualitatif menurut Surachman (1975) adalah merupakan istilah umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklarifikasikan, menggambarkan, dan menganalisa data, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini sehingga dapat dijadikan suatu kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Menarik dari kesimpulan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menuturkan dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini akan mencoba menguraikan terkait kegiatan-kegiatan, sikap maupun bentuk dari keterlibatan relawan anak muda dalam konstelasi politik 2019.

8.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terkait dengan *Civic Engagement: Voluntarisme Generasi Muda Dalam Konstelasi Politik 2019 (Studi Kasus: Gerakan Milenial Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)* dilakukan di Gerakan Milenial Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi tersebut dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia dari Badan Pusat Statistika (BPS) yang dirilis oleh Tirto.id pada tanggal 12 September 2018 yang merupakan proyeksi penduduk usia 20-34 tahun untuk tahun 2019 ini menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah anak muda (milenial) 911 yang terbilang cukup banyak dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan kota pelajar.

8.3. Subjek dan objek penelitian

Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi

tersebut, Moeliono (1993) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut sasaran pengamatan atau informasi pada penelitian ini adalah relawan Gerakan Millennial Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta seperti koordinator, Sekretaris, Bendahara dan juru bicara serta anggota yang terlibat langsung di lapangan.

Tabel 1.2
Daftar informan Utama dan sumber pendukung

No	Sumber Informan Utama	Sumber Pendukung	Jumlah
1	Koordinator Gerakan Millennial Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Sekretaris GMI DIY 2. Bendahara GMI DIY 3. Juru Bicara GMI DIY	5 Orang
2	Anggota yang terlibat langsung di lapangan	Secara Acak	5 orang
Total			10 Orang

Objek Penelitian merupakan suatu hal yang cukup peting dalam melaksanakan penelitian, oleh karena itu objek dalam penelitian ini di tetapkan oleh peneliti yaitu, *Civic Engagement*: voluntarisme generasi muda dalam konstelasi politik 2019 dengan studi kasusnya adalah Gerakan Millennial Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta.

8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

8.4.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang di dapatkan dari sumber pertama yang berasal dari seseorang atau instansi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang di dapatkan dari relawan yang tergabung dalam Gerakan Millennial Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dan yang memiliki jabatan strategis di dalamnya seperti koordinator, Sekretaris, Bendahara dan juru bicara serta anggota yang terlibat langsung di lapangan.

Tabel 1.3
Sumber Data Primer

Sumber Data	Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
a. Koordinator Gerakan Millennial Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	a. Keterlibatan relawan GMI DIY dalam konstelasi politik tahun 2019.	Wawancara
b. Sekretaris Gerakan Millennial Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta	b. Faktor-faktor yang mendorong generasi muda terlibat menjadi relawan GMI DIY dalam konstelasi politik 2019.	
c. Bendahara Gerakan Istimewa Yogyakarta		
d. Juru Bicara Gerakan Millennial Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta		
e. Anggota yang terlibat langsung di lapangan		

8.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengamatan studi kepustakaan (*library research*) maupun menggunakan data-data yang sudah tersedia berupa bahan-bahan seperti jurnal, artikel penelitian, buku, ataupun yang di anggap oleh peneliti relevan untuk digunakan dalam mendukung penelitian. Dalam penelitian ini data yang di dapatkan oleh peneliti dari jurnal, artikel, dan buku.

8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan dalam penelitian yang di anggap penting sebelum turun melakukan penelitian karena melihat bahwa tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mencari data sebanyak-banyaknya untuk bisa di analisis menjadi sebuah jawaban dalam menjelaskan permasalahan atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

8.5.1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan demikian penelitian dengan metode kualitatif seperti penelitian ini dengan teknik

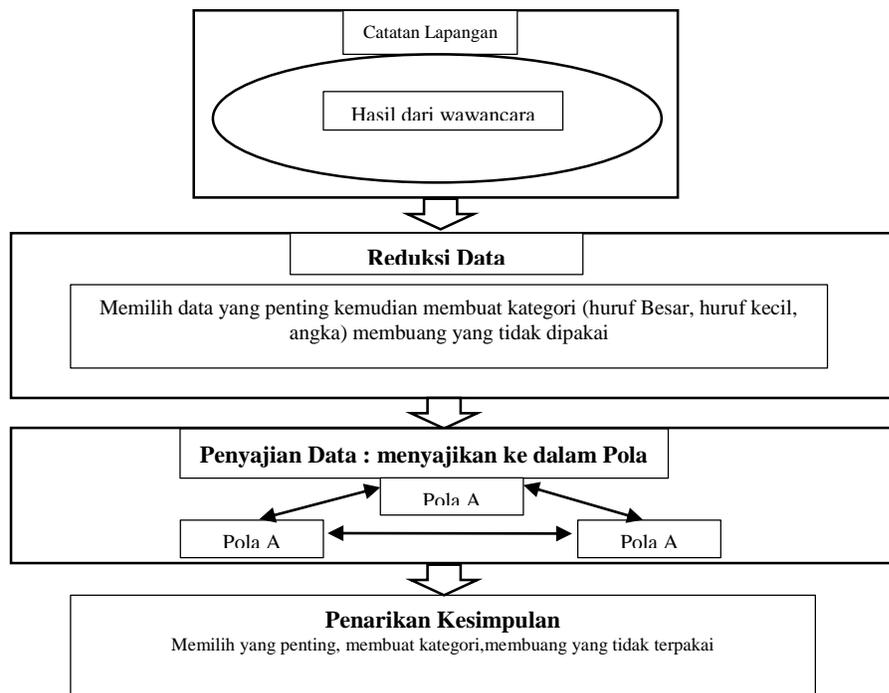
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara adalah hal yang sangat penting untuk digunakan. Karena menggunakan teknik ini bisa mendapatkan data dari sumber yang sesuai dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan wawancara dengan relawan gerakan milenial Indonesia daerah istimewa yogyakarta dan yang memiliki jabatan strategis seperti koordinator, sekretaris, dan juru bicara.

8.5.2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dari studi dokumen dapat menjadi tambahan data bagi peneliti selain wawancara.

8.6. Teknik Analisis Data

Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka peneliti menggunakan analisis deskriptif, dimana setelah data yang terkumpul tersebut diolah kemudian dianalisa dengan memberikan penafsiran berupa uraian diatas tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data terkait penelitian yang akan dilakukan dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 : Komponen dalam analisis data (*flow model*)
 Sumber : (Sugiyono 2017)

Dengan demikian jika mengacu pada analisis data lapangan model dari Miles dan Huberman terkait analisis data lapangan yang dilakukan secara interaktif dan belangsung secara terus menerus sampai tuntas. Kegiatan dalam analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan terkait dengan civiv engagement: voluntarisme generasi muda dalam konstelasi politik dengan studi kasusnya GMI DIY, yang di jabarkan sebagai berikut: Sugiyono (2017)

8.6.1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari polanya, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data terkait dengan keterlibatan generasi muda dalam konstelasi politik 2019. Dalam artiannya reduksi data ialah data yang di dapat dilapangan terlebih dahulu di pilah terkait dengan informasi atau keterangan yang di anggap tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

8.6.2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dibaca atau dipahami. Dalam hal ini penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik atau sejenisnya tentang fenomena yang terjadi. Terkait dengan penyajian data dalam bentuk uraian singkat di gunakan untuk menjelaskan semua data yang sudah di kumpulkan dan sudah di reduksi agar mudah untuk di pahami.

8.6.3. Penarikan kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Dari situ dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

Dengan demikian ketiga komponen itu saling mempengaruhi dan mempunyai keterkaitan. Pertama – tama peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara setelah itu di tambahkan dengan data yang di dapatkan dari teknik dokumentasi. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan memilih data yang relevan dengan penelitian ini untuk di buatkan kategori berupa huruf besar/kecil dan angka dan membuang yang tidak di pakai. Setelah direduksi kemudian disajikan data dengan beberapa pola yang dimana saling berhubungan agar penjelasan terstruktur dan mudah di pahami. Setelah itu barulah di tarik kesimpulan dengan tetap merujuk pada rumusan masalah untuk mendapatkan kesimpulan yang baik.